

DINAMIKA NEGARA-NEGARA TERITORI ASING DI KAWASAN PASIFIK BARAT DAYA

Burhanuddin

Ilmu Hubungan Internasional.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Abstrak

Dinamika Negara-Negara Teritori Asing di Kawasan Pasifik Barat Daya, Tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa hampir semua Negara teritori Asing di kawasan pasifik barat daya merupakan wilayah yang tanpa pemerintahan dan telah dikelola oleh Negara bekas koloni. Terdapat keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh Negara-negara yang sistem pemerintahannya diatur oleh Negara koloni misalnya segala bentuk dan jenis kebijakan yang diatur dan ditetapkan oleh Negara koloni tanpa harus mempertimbangkan atau mendengar aspirasi Negara-negara teritori. Kadangkala kebijakannya merugikan bahkan cenderung mengeksploitasi masyarakat dinegara-negara teritori asing pasifik barat daya. Permasalahan umum yang dihadapi oleh Negara-negara teritori adalah akses terhadap dunia luar yang sulit sebab wilayahnya terpencil dan akses informasi yang minim akibatnya kegiatan ekonomi lumayan sulit untuk terlaksana dengan baik. Pokok kajian dalam tulisan ini adalah terkait profil dan sejarah Negara-negara teritori Pasifik barat daya. (Kaledonia Baru atau New Caledonia, teritori dari Perancis dan masih dalam pengawasan Perancis. Tokelau, Kepulauan Pitceirn, American Samoa) Bagaimanakah peran Perancis di Negara New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna terkait keberadaan isu nuklir? Bagaimanakah peran Amerika Serikat di Negara American Samoa, Guam, Hawaii, Mariana Utara? Selain masalah perekonomian, Jumlah penduduk yang berpendidikan rendah yang belum mampu membawa Negara-negaranya kearah yang lebih baik. seringkali wilayah tersebut terkena badai maupun kenaikan permukaan air laut. Dan yang paling tragis adalah empat percobaan persenjataan nuklir.

Kata Kunci: *Negara - Negera Teritori Pasifik barat daya. Caledonia, Perancis. Tokelau, Kepulauan Pitceirn, American Samoa Perancis di Negara New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna Amerika Serikat di Negara American Samoa, Guam, Hawaii, Mariana Utara*

Abstract

The dynamics of the Territory of Foreign Countries in the Western Pacific Region Power, No longer a secret that almost all countries foreign territories in the Pacific southwest region is a region without governance and has been managed by the State of former colonies. There are advantages and disadvantages derived by States that system of government is regulated by the State Colony for example all forms and types of policies are governed and determined by the State colonies without having to consider or hear the aspirations of countries territories. Sometimes discretion harm even tend to exploit people in countries foreign territory pacific southwest. Common problems faced by the countries territory is access to the outside world is difficult because the area is remote and minimal access to information as a result of economic activity fairly difficult to be implemented properly. Principal study in this paper is related to the profile and history of the country southwest Pacific territory. (New Caledonia or New Caledonia, the territory of France and still in control of France. Tokelau Islands Pitceirn, American Samoa) What is the role of France in the State of New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna related to the existence of the nuclear issue? How is the role of the USA in the State American Samoa, Guam, Hawaii, Northern Mariana? In addition to economic issues, Total population with low education who have not been able to bring States towards a better country. The region is often hit by hurricanes and rising sea levels. And the most tragic is the four experiments of nuclear weapons.

Keywords: Country - State Territory Pacific southwest. Caledonia, France. Tokelau, Pitceirn Islands, American Samoa France in the State of New Caledonia, French Polynesia, Wallis and

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia hubungan internasional telah kita ketahui bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara yang dulunya tertekan dibawah aktivitas kolonialisme dan imperialisme yang massive kemudian bergolak, sehingga *Decolonization* atau fenomena dekolonisasi pun mewabah menjangkiti Negara-negara jajahan, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.

Dekolonialisasi secara harfiah merujuk pada tercapainya kemerdekaan oleh berbagai koloni dan proktektorat barat. Hal ini muncul seiring dengan gerakan intelektual yang dikenal dengan Post-Kolonialisme. Periode dekolonisasi yang sangat aktif terutama terjadi antara tahun 1946-1960, dibuka dengan kemerdekaan Pakistan dan India dari Britania Raya pada tahun 1947 dan Perang Indo-china pertama. Meskipun demikian, gerakan pembebasan nasional sebenarnya sudah sering kali terbentuk, hanya saja selalu digagalkan oleh Negara penjajah.

Dekolonisasi dapat tercapai dengan pernyataan kemerdekaan, mengintegrasikan diri dengan kekuasaan penguasa atau negara lain, atau menciptakan status “asosiasi bebas” (*free association*). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa dalam proses dekolonisasi tidak ada alternatif selain prinsip kebebasan menentukan (*self-determination*). Dekolonisasi mungkin melibatkan negosiasi damai dan atau revolusi dengan kekerasan atau pertikaian senjata oleh penduduk asli.

Isu dekolonisasi mulai berkembang di kawasan Pasifik Barat Daya pasca Perang Dunia ke II pada sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an. Kemerdekaan wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Barat Daya diperoleh dengan tanpa perang atau gerakan pemberontakan terhadap negara-negara kolonialnya. Semula wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Barat Daya dikembalikan kepada negara-negara kolonialnya yaitu Australia, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru berdasarkan mandat dari PBB. Akan tetapi, berbagai tuntutan atas kemerdekaan oleh wilayah-wilayah koloni membuat negara-negara penjajah terpaksa melepaskan wilayah jajahannya di kawasan Pasifik Barat Daya.

Ternyata, tidak semua Negara di PBD serta-merta berhasil menuntut kemerdekaannya, ada juga beberapa Negara di kawasan pasifik barat daya yang maasih *inherently* menginginkan keterikatan dengan Negara koloninya, hal ini misalnya saja disebabkan oleh keterikatan baik secara politik, maupun dalam bidang ekonomi (bantuan luar negeri).

Dikatakan sebagai “Teritori Asing Pasiifik Barat Daya” karena Negara-negara yang antara lain adalah : New Caledonia, French Polynesia, wallis and futuna, American Samoa, Hawaii, Guam, Mariana Utara, Kepulauan Cocos, Natal Island, Tokelau, Kepulauan Pitcairn, dan Paskah Island, sampai saat ini masih merupakan teritori atau wilayah cakupan kekuasaan dari beberapa Negara di barat (Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia, Chili, dan Perancis). Oleh karena itu penulis akan mencoba menganalisa hubungan antara Negara proktektorat di kawasan PBD dengan Negara induknya dalam berbagai sektor.

Kawasan Pasifik Barat Daya merupakan kumpulan negara-negara yang terletak di Samudera Pasifik. Kawasan ini terbentang mulai dari Papua Nugini di sebelah barat hingga Kepulauan Pitcairn di sebelah timur. Kawasan ini memiliki wilayah lautan yang meliputi 1/3 dari wilayah laut dunia. Terdiri dari pulau-pulau kecil yang umumnya terpisah satu sama lain dengan jarak yang berjauhan. Selain itu, kawasan ini juga tidak terlepas dari pengaruh negara-negara asing, mengingat pernah terjadi dekolonialisasi di kawasan Pasifik Barat Daya ini. Akibatnya, di kawasan ini terdapat teritori-teritori asing dari negara-negara lain, seperti Kaledonia Baru atau New Caledonia, teritori dari Perancis dan

masih dalam pengawasan Perancis. Tokelau, Kepulauan Pitceirn, American Samoa dan lainnya.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dipaparkan lebih lanjut mengenai profil dan hal-hal yang berhubungan dengan teritori asing di Kawasan Pasifik Barat Daya, khususnya Kaledonia Baru.

1. Pokok kajian dalam tulisan ini adalah terkait profil dan sejarah Negara-negara teritori Pasifik barat daya. (Kaledonia Baru atau New Caledonia, teritori dari Perancis dan masih dalam pengawasan Perancis. Tokelau, Kepulauan Pitceirn, American Samoa) Bagaimanakah peran Perancis di Negara New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna terkait keberadaan isu nuklir ?
2. Bagaimanakah peran Amerika Serikat di Negara American Samoa, Guam, Hawaii, Mariana Utara?
3. Bagaimanakah peran Australia di Kepulauan Cocos dan Natal Island?
4. Bagaimanakah peran New Zealand di Negara Tokelau?
5. Bagaimanakah kondisi geografis dan demografis Negara-negara teritori asing Pasifik barat daya?
6. Bagaimana sistem politik, pertahanan, dan pemerintahan Negara-negara teritori asing Pasifik barat daya?

2. PEMBAHASAN

A. PERAN PERANCIS, AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

1. Perancis

Setelah melepaskan Vanuatu, Perancis masih memiliki beberapa wilayah kekuasaan di Pasifik Selatan. Wilayah tersebut adalah Kaledonia Baru, Polinesia Perancis, serta Wallis dan Futuna. Penyebab tertundanya kemerdekaan di wilayah-wilayah tersebut adalah karena masih adanya kepentingan-kepentingan Perancis, dan keengganan masyarakatnya untuk lepas dari Perancis. Kepentingan Perancis di beberapa wilayah Pasifik Selatan terkait dengan proyek nuklir Perancis dimana laboratoriumnya terdapat di Kaledonia Baru dan tempat ujicobanya di Polinesia Perancis tepatnya di Pulau Atol Mururoa. Proyek ujicoba nuklir Perancis ini merupakan pindahan dari Aljazair semenjak negara tersebut merdeka pada tahun 1966.

a. New Caledonia

New Caledonia adalah sebuah pulau yang terletak di samudra Pasifik. New Caledonia merupakan Negara extra-teritori dari Perancis. Sebelum menjadi sebuah Negara teritori dari Perancis Negara ini mempunyai sejarah tersendiri. Suku asli yang mendiami pulau ini adalah suku Kanak yang diperkirakan telah hidup di pulau ini sejak 6.000 tahun yang lalu. Perancis kemudian menganeksasi wilayah ini pada tanggal 24 September 1853, sepuluh tahun kemudian pulau ini dijadikan sebagai Negara koloni dari Perancis.

Tahun 1970 suku asli kanak yang mulai terpinggirkan ini mulai membentuk gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan. Tahun 1984 FLNKS (Kanak National Socialist Liberation Front) yang merupakan gerakan yang mendukung kemerdekaan New Caledonia, gerakan ini juga mendirikan pemerintahan independen sementara. Hal ini menyebabkan RPCR yang merupakan gerakan yang masih loyal terhadap Perancis marah dan mengadakan konfrontasi dengan FLNKS. Konfrontasi ini berlangsung selama 1984-1988 yang menyebabkan korban jiwa. Hal ini menyebabkan Pemerintah Perancis mengajak pihak yang pro-kemerdekaan dan gerakan loyalis untuk melakukan perjanjian. Perjanjian ini memberikan otonomi yang lebih besar dan Perancis akan memberikan bantuan untuk memperbaiki ketimpangan hidup suku kanak dengan masyarakat Perancis.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya 5 Mei 1998, PM Perancis Jospin menandatangani *Noumea Accord* yang disetujui oleh 72% masyarakat melalui referendum tanggal 8 November 1998. Perjanjian

ini mengatur bahwa New Caledonia berubah status dari wilayah luar negeri Perancis menjadi wilayah “overseas” atau “collective” dalam konstitusi Perancis. Perjanjian ini memberikan otonomi yang lebih besar sehingga New Caledonia mengubah nama, bendera, dan lagunya yang menunjukkan identitas suku Kanak.

Ekonomi

Sumber Pendapatan terbesar dari Negara ini adalah Nikel yang menyumbang 90% pendapatan ekspor. New Caledonia merupakan Negara ketiga penghasil nikel terbesar di dunia.

Hubungan dengan Negara Induk

Berdasarkan *Noumea Accord*, New Caledonia menjadi representasi Perancis di Uni Eropa dan Pasifik. Pada tahun 1999 Kaledonia Baru menjadi pengamat dari Forum Kepulauan Pasifik, dan mencapai keanggotaan Asosiasi pada tahun 2006.

Kemungkinan otonomi yang diberikan kepada New Caledonia hanya bertahan sampai 2018 sesuai yang diatur dalam *Noumea Accord*. Dua kemungkinan besar yang akan terjadi pada saat 2018, pertama otonomi yang diberikan akan dicabut kembali dan kedua akan diberikan kebebasan penuh.

b.. French Polynesia

Tahun 1946 koloni ini menjadi Overseas Territory Perancis, dan Majelis Teritorial pun dibentuk untuk mengatur hubungan dalam negeri. Akhir tahun 1940-an gerakan kemerdekaan bergejolak di wilayah tersebut. Dalam referendum yang diadakan di tahun 1958, para pemilih memutuskan untuk tetap menjadi wilayah teritori Perancis daripada harus merdeka dan kehilangan bantuan ekonomi dari Perancis.

Pemerintahan

Warga Polinesia Perancis merupakan warga negara Perancis, namun untuk urusan hubungan dalam negeri tetap diurus oleh pemerintahan dalam negeri melalui Majelis teritorial terpilih. Di tahun 1977, pemerintah Perancis mengeluarkan undang-undang demi meningkatkan derajat otonomi lokal di Polinesia Perancis, sementara undang-undang yang diberlakukan di tahun 1984, 1987 dan 1990 telah meningkatkan otonomi pemerintahan wilayah teritori di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintahan Perancis bertanggung jawab atas bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan peradilan di Polinesia Perancis. Presiden Perancis merupakan kepala negaranya, yang diwakili oleh High Commissioner.

Sebagai wilayah seberang lautan Perancis, pemerintah lokal Polinesia Perancis tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah peradilan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, di Polinesia Perancis tidak terdapat kekuasaan Yudikatif. Otoritas yudisial tetap dikuasai oleh Presiden Perancis. Baik struktur peradilan, maupun pekerjaannya ialah bagian dari sistem Yudisial Perancis. Polinesia Perancis sendiri memiliki berbagai tingkatan pengadilan, termasuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.

Pemerintah Polinesia Perancis mengatur hampir seluruh hubungan dalam negeri, termasuk peraturan penangkapan ikan, pertambangan dan kegiatan pelayaran; komunikasi dan penyiaran; perpajakan; pendidikan; dan juga kesehatan, dimana sistem pelayanan kesehatan Polinesia Perancis merupakan yang terbaik di kepulauan Pasifik, yang sebagian besar dananya didapatkan dari bantuan Perancis. Majelis memilih seorang Presiden Teritori, yang menjadi kepala pemerintahan teritorial. Presiden Teritori menunjuk menteri-menteri dalam kabinetnya.

Proyek Nuklir Perancis

Sejak tahun 1966 Perancis memulai program tes nuklirnya di pulau-pulau tak berpenghuni di kepulauan Tuamotu, yang kemudian memunculkan peningkatan fasilitas dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan pariwisata dan tes nuklir mengubah bentuk dasar ekonomi Polinesia Perancis dari pertanian sebagai sumber penghidupan utama menjadi jasa dan pelayanan, yang berakibat meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri.

Uji coba Nuklir kembali dilanjutkan ditahun 1995. Uji coba kali ini memercikkan api yang mengakibatkan kekacauan dalam skala besar, yang menghancurkan distrik bisnis di Papeete, bandara, dan fasilitas-fasilitas turisme dan mengakibatkan kemerosotan yang berkelanjutan di bidang pariwisata. Walaupun pihak-pihak yang terkait telah berjanji akan menanggung akibat dari kecerobohan tes nuklir, namun banyak pemuda pengangguran yang dipenuhi oleh rasa kecewa karena tidak memiliki pekerjaan memicu terjadinya huru-hara dengan tes nuklir sebagai dalih untuk melepaskan kekesalan mereka.

Di bulan Maret 1996 pemerintah Perancis menandatangani Traktat Zona Bebas Nuklir Pasifik selatan, yang melarang uji coba nuklir di daeah tersebut. Penghentian uji coba menakibatkan jumlah gangguan yang besar, namun Perancis berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah yang besar untuk membantu kebangkitan ekonomi Polinesia Perancis. Bulan maret 2009, pemerintah Perancis memberlakukan Undang-Undang untuk memberikan kompensasi bagi pekerja pada lokasi persenjataan nuklir Perancis.

Sebuah pengadilan di French Polynesia mulai mendengar keluhan dari mantan pekerja di lokasi tes senjata nuklir Perancis. Kasus yang didengar pertama kali berhubungan dengan pengujian nuklir di Mururoa dan Fangataufa yang berdampak pada kesehatan penduduk menjadi buruk. Delapan kasus telah diajukan, meskipun lima dari pekerja telah meninggal karena terkena penyakit dari radiasi nuklir yang ditimbulkan.

c. Wallis and Futuna

Wallis and Futuna merupakan negara teritori asing dari Perancis sejak tahun 1961. Negara ini terletak di Laut Pasifik Selatan, berada diantara New Zealand dan Hawaii. Wallis and Futuna terdiri dari 3 pulau besar yang merupakan 3 kerajaan kecil yaitu Alo, Sigave, dan Wallis. Meskipun berada di negara itu sendiri namun ketiga kerajaan tersebut tetap berada di bawah pemerintahan Perancis.

Negara ini termasuk negara vulkanis dimana terdapat 3 gunung di pulau besarnya dan satu yang berada di pulau Alofi merupakan gunung aktif sehingga tidak ada yang mendiami pulau tersebut secara permanen karena kurangnya sumber daya terutama air.

Sejarah Kolonialisme

Awalnya Wallis and Futuna merupakan 2 area yang berbeda sebelum diambil alih oleh Perancis. Wallis sendiri ditemukan oleh semorang penjelajah Inggris bernama Samuel Wallis di abad ke 18. Wallis awalnya didiami oleh suku Tonga, Futuna ditemukan oleh penjelajah dari Belanda pada abad ke 15. Namun Perancis lah yang kemudian mengambil alih Wallis and Futuna dengan mendeklarasikan protektorat di tahun 1842 dan mengambil alih secara resmi pada tahun 1886 dan 1888.

Keadaan Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya

Perekonomian di Wallis and Futuna bergantung pada pertanian, yaitu taro, keladi, kentang, dan umbi – umbian lainnya serta peternakan yang kebanyakan adalah ayam dan babi. Namun teritori ini tidak dapat memproduksi cukup makanan untuk penduduknya saja sehingga 1/3 dari impornya merupakan bahan makanan. Bahan baku untuk pembangunan merupakan impor utama dari Wallis and Futuna. Tidak ada sama sekali ekspor dari Wallis and Futuna kecuali pengiriman makanan untuk

keluarga mereka yang bersekolah atau kerja di New Caledonia.

Masalah perekonomian terbesarnya adalah angka pengangguran yang cukup tinggi, dimana kira-kira hanya sekitar 1800 orang dari 15000 penduduk yang bekerja, baik itu di sektor pemerintahan dan swasta. Hal ini membuat Wallis and Futuna amat bergantung pada bantuan sosial dari Perancis. Pemerintah Perancis langsung mendanai banyak pelayanan (layanan kesehatan, edukasi, dan gaji pegawai pemerintahan).

Badan pemerintahan Wallis and Futuna terbagi 3, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Badan Eksekutif terdiri dari kepala negara yaitu Presiden Perancis yang direpresentasikan oleh seorang High Administrator, kepala pemerintahannya yang merupakan pemimpin dari seluruh pulau teritori (pemimpin Territorial Assembly), dan sebuah kabinet yang di dalamnya terdapat Badan Teritori yang terdiri dari 3 raja dan 3 anggota yang dipilih oleh High Administrator berdasarkan petunjuk dari Territorial Assembly. High Administrator ditunjuk oleh Presiden Perancis berdasarkan petunjuk dari Kementrian Perancis, dan pemimpin Territorial Assembly dipilih oleh anggota Assembly.

2. Amerika Serikat

Amerika Serikat melakukan negosiasi kemerdekaan di wilayah koloninya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Kebijakan dekolonisasi AS di wilayah Pasifik Selatan juga terkait dengan kepentingan strategisnya. Seperti pangkalan angkatan laut AS, yang telah menjadi bagian dari AS sejak tahun 1950, dan pertimbangan pertahanan dan keamanan lainnya yang dapat kita lihat pada proses kemerdekaan Kepulauan Marshall dan FSM (gabungan pulau Yap, Truk, Ponape, dan Kosrae) yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pelepasan hak-hak mereka untuk mengendalikan masalah pertahanan. Sebagai gantinya, hak tersebut secara penuh diberikan kepada AS yaitu dengan memiliki pangkalan-pangkalan militer, termasuk penyimpanan senjata nuklir

a. American Samoa

Persaingan Internasional pada abad ke-19 ditentukan dengan adanya perjanjian dimana Jerman dan US membagi Samoa (1899). US secara formal mengambil hak atas bagiannya, yaitu pulau yang lebih kecil disebelah timur dengan pelabuhan yang unggul, Pago Pago.

Sistem pemerintahan American Samoa juga berkaitan erat dengan Negara induknya, Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan kepala Negara yang dipimpin oleh President Barack Obama. Akan tetapi, untuk kepala pemerintahan masih menjadi hak eksklusif dari rakyat Samoa untuk menentukan.

Tidak terdapat divisi administrasi yang resmi yang ditetapkan oleh US di American Samoa. American Samoa di administrasi oleh Office of Insular Affairs US Department of the Interior. Dibawah konstitusi US, penduduk territorial yang unincorporated, seperti American Samoa, tidak diperkenankan untuk memilih di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden US, tetapi, mereka dapat memilih pada Democratic and Republican presidential primary elections; gubernur dan letnan terpilih mengambil suara terbanyak untuk masa jabatan 4 tahun.

b. Guam

Setelah Spanyol menyerahkan Guam kepada US pada 1898., pergolakan kembali terjadi dengan direbutnya Guam oleh Jepang pada 1941, yang kemudian diambil kembali oleh US pada tahun 1944. *Eventually*, Instalasi militer di Guam merupakan salah satu basis US yang strategis dan penting di Pasifik.

Sama halnya dengan American Samoa, yang merupakan *territorial unincorporated* dari US, dalam hal politiknya tidak berbeda. Mereka tidak memiliki divisi atau kantor administrasi, melainkan semua kebijakan yang berkaitan dengan politik terhubung dengan US melalui Office of Insular Affairs.

Begitu pula halnya dengan perihal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden US. Guam tidak diperkenankan memilih. Namun, yang memegang sebagai kepala Negara tetap adalah Presiden Amerika Serikat, sekalipun rakyat Guam tidak diperkenankan memilih presidennya. Hanya saja yang dipilih oleh rakyat Guam sendiri adalah kepala pemerintahan.

Terdapat juga beberapa pressure group, yaitu: Guam Commission on Decolonization; Guam Federation of Teachers' Union; Guam Waterworks Authority Workers; We Are Guahan. Pressure group inilah yang menunjukkan partisipasi politik masyarakat Guam terhadap negaranya.

c. Mariana Utara

Kepulauan Mariana Utara awalnya ditemukan dalam penjelajahan laut dengan menggunakan kano oleh orang-orang dari Indonesia dan Filipina yang kemudian menjadi penduduk lokal di kepulauan ini yang bernama Chamorro. Setelah itu, Ferdinand Magellan, seorang penjelajah dari Spanyol, menemukan kepulauan ini dalam ekspedisinya mencari rempah-rempah dan emas. 147 tahun kemudian, Fr. Diego Luis de San Vitores, tiba di kepulauan tersebut dengan misi menyebarkan ajaran Katolik. Di sinilah titik kolonisasi dari Spanyol. Nama Mariana diambil dari nama Ratu Spanyol pada saat itu, Queen Maria Ana.

Pada tahun 1899, Jerman membeli Kepulauan Mariana Utara dari Spanyol dan mendudukinya hingga tahun 1914 sebelum Perang Dunia I dimulai. Pada saat itu, Jepang kemudian mengambil alih kepulauan itu melalui sebuah perjanjian rahasia dengan UK demi menjaga perdamaian di Asia selama perang. Kemudian pada tahun 1944, Amerika Serikat mengambil alih kepulauan ini. Penduduk lokal kepulauan memilih untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan bergabung menjadi negara persemakmuran pada bulan Januari 1978.

Keadaan Ekonomi, Politik, Sosial Budaya

Perekonomian Kepulauan Mariana Utara bertumpu pada pariwisata, selain dari bantuan ekonomi dari negara induknya, Amerika Serikat. Industri pariwisatanya yang besar sehingga membuat penduduk yang menganggur berkurang. Pengunjung kepulauan ini kebanyakan berasal dari Jepang dan Korea. Pantainya yang jernih dan berpasir putih, peninggalan sejarah Perang Dunia II, batu karang, festival budaya lokal, dan hiburan modern seperti pusat belanja, hiburan outdoor dan lain sebagainya menjadi daya tarik yang tinggi bagi para turis untuk mengunjungi kepulauan ini.

3. Australia

Sekalipun merupakan Negara persemakmuran dari Inggris, tetapi Australia mampu membuktikan *bargaining* nya dengan mengklaim beberapa wilayah di Pasifik Barat Daya (Oceania), Australia tergolong Negara makmur, sebagai negara yang makmur Australia mampu mengayomi Negara-negara satelitnya, salah satunya dengan memberikan bantuan dana sebagai bentuk sokongan atas ekonomi negara-negara koloninya. Tidak sampai di situ saja, kepulauan Cocos dan Natal Island bahkan cenderung tidak menginginkan kemerdekaan karena berbagai kemudahan yang diberikan sebagai Negara satelit Australia.

a. Kepulauan Cocos

Pulau ini adalah pulau yang terdiri dari 2 atol dan 27 pulau karang. Pulau ini ditemukan oleh William Keeling 1609, tidak berpenghuni sampai abad 19. Pulau ini kemudian dianeksasi oleh Inggris tahun 1857. Aneksasi ini dibawa oleh Kapten Stephen Grenville Fremantle. Tanggal 9 November pulau ini menjadi salah satu tempat (daerah) Perang Dunia I. Tanggal 23 Oktober 1955 ditransfer ke Australia berdasarkan *Cocos (Keeling) Island Act 1955*. Ditahun ini juga pulau ini dinyatakan sebagai

Taman Nasional Australia.

b. Natal Island

Negara ini ditemukan dan dinamakan oleh William Mynors pada hari Natal (Christmas Day) pada 1643. Tahun 1875 dilakukan eksplorasi pertama. 6 Juni 1888 dianeksasi oleh Inggris karena menemukan fosfat yang berlimpah di pulau tersebut. Pulau ini sempat menjadi target Jepang. Setelah Perang Dunia II, Pulau ini berada di bawah yurisdiksi koloni Inggris (Singapura). Pulau ini sebagai koloni yang terpisah dari 1 Januari 1958 sampai 1 Oktober 1958 ketika transfer yuridiksi Australia diselesaikan. Transfer ini dilakukan atas permintaan Australia, sehingga Australia harus membayar kompensasi £ 2,9 milyar ke Pemerintah Singapura. Transfer ini menjadikan Christmas Island menjadi Negara territory Australia. Tanggal itu dirayakan pada hari Senin pertama bulan Oktober sebagai *Territory Day*. Hampir dua pertiga dari pulau telah dinyatakan sebagai taman nasional. **New Zealand**

Dikawasan pasifik barat daya hanya satu Negara yang menjadi daerah luar negeri dari New Zealand, meskipun ditinjau dari segi luas wilayah New Zealand yang tidak cukup luas tetapi dengan ekonominya New Zealand mampu membuat Negara Tokelau di PBD secara sukarela menyerahkan negaranya untuk menjadi Negara proktektorat dari New Zealand. Pada kenyataannya, Tokelau masih sangat bergantung secara ekonomi dengan New Zealand, oleh karena itu keputusan untuk dekolonisasi kemudian di urungkan.

4. Tokelau

Pada mulanya ditempati oleh bangsa Polinesia yang beremigrasi dari pulau-pulau sekelilingnya. Tokelau dulunya dijadikan sebagai tempat perlindungan bangsa Inggris pada 1889. Mereka kemudian di transfer ke administrasi New Zealand pada 1925. Pemungutan suara lalu diadakan pada 2006 dan 2007 untuk mengganti status Tokelau menjadi sebuah teritori bebas.

Politik

Merupakan self-administering dari New Zealand. Tokelau dan New Zealand telah menyetujui konsep konstitusi dimana Tokelau menjadi sebuah asosiasi bebas bersama New Zealand. Referendum yang disponsori oleh UN dalam hal self-governance pada Oktober 2007 tidak mencapai 2/3 mayoritas suara untuk perubahan status politik. Sistem pemerintahan di Tokelau tidak mengenal adanya sistem eleksi. Sistem kerajaan, bersifat turun-temurun. Gubernur jendral ditentukan oleh raja; administrator ditentukan oleh Menteri Pertahanan dan Pertukaran Luar Negeri di New Zealand; dan kepala pemerintahan ditentukan oleh Council of Faipule atau Kabinet Tokelau.

B. PROFIL DAN SEJARAH NEGARA-NEGERA TERITORI PASIFIK BARAT DAYA

1. TOKELAU

1.1. PROFIL DAN SEJARAH TOKELAU

Tokelau adalah Negara teritori Asing di Pasifik Barat Daya. Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Tokelau adalah Inggris, lagu kebangsaan Viki O Tokelau. Status politik Tokelau adalah Wilayah Selandia Baru dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Total wilayahnya 10,8 km², jumlah penduduk Penduduk 1,443 jiwa . Menggunkan mata uang New Zealand dollar (NZD) dan masyarakatnya Menganut kepercayaan Kristen Kongregasi, Katolik Roma, dan lainnya.

Tokelau pertama kali dihuni oleh kaum imigran Polinesia yang berasal dari gugus pulau tetangga. Tokelau ditetapkan sebagai protektorat Britania pada 1889, menjadi bagian dari Koloni Britania Kepulauan Gilbert & Ellice pada 1916, sebelum berada dalam administratif Selandia Baru pada 1925. Kini Tokelau masih berstatus wilayah Selandia Baru. Sektor pertahanan menjadi tanggung

jawab negara induk. Seperti juga Niue dan Kepulauan Cook, warga Tokelau sedang menyusun konstitusi dan mengembangkan institusi dan pola pemerintahan sendiri untuk membentuk asosiasi bebas (free association) dengan Selandia Baru.

1. Geografi Tokelau

Tokelau terdiri dari tiga pulau kecil di Samudra Pasifik Selatan yang merupakan pertengahan antara Hawaii dan Selandia Baru. Tokelau tidak memiliki pelabuhan atau dermaga. Total wilayah daratan sebesar 10,8 km². Atol-atol koral membentuk ketiga pulau, yaitu:

a. Fakaofu

Fakaofu atau Bowditch Island adalah pulau paling tenggara dari tiga pulau karang dari Tokelau, berada antara 560 dan 566 mil laut selatan katulistiwa, pulau kecil dengan tinggi rata-rata sekitar sepuluh kaki. Kebanyakan ditutupi dengan hutan kecil dari pohon kelapa dan semak belukar dan pohon yang rendah yang memberi pulau yang sangat kecil itu suatu total tingginya dari 70 atau 80 kaki. Ada banyak kadal ekor hijau kecil, dan beberapa dari ukuran lebih besar yang memucat dari sari ke hitam, menurut latar belakang mereka. Serangga adalah berlimpah-limpah, dengan spesies besar capung, dua macam kupu-kupu, ngengat sphinx coklat kemerahan, belalang, jengkerik, kumbang, semut, lalat berkaki panjang, laba-laba, dan, nyamuk.

b. Nukunono

Nukunono atau pulau Duke of Clarence adalah pulau karang tengah dari Tokelau. Berada 546 sampai 554 mil laut dari utara katulistiwa, Pulau karang tersebut mempunyai suatu area daratan dari 1,350 akre. Kebanyakan dari pulau kecil di sekitarnya ditumbuhi sejumlah hutan kecil dari pohon kelapa semak belukar dan pohon yang rendah. Burung-Burung laut, ketam pertapa, tikus besar dan serangga, sama halnya pada pulau-pulau di Pasifik lainnya dan di sana hidup keanekaragaman laut yang berlimpah-limpah dipesisir batu karang, dan di danau di pinggir laut yang dangkal, yang berisi batu karang dan kepala karang.

c. Atafu

Atafu atau Pulau Duke of York adalah pulau karang yang terletak di barat daya dari kelompok pulau Tokelau. terletak 513 mil laut dari selatan katulistiwa, Atafu adalah pulau karang yang rendah, berbentuk segi tiga secara garis besar, lebarnya sekitar tiga mil ke utara dan dua setengah mil ke selatan. tinggi daratan dari 12 sampai 15 kaki, tetapi ditumbuhi sejumlah pohon dan pohon kelapa, dan mempunyai area sekitar 550 akre. Pulau dihuni oleh 380 orang (1932), semua penduduk asli dari pulau Tokelau.

2. Demografi

Tokelau dihuni oleh sekitar 1.500 penduduk etnik Polinesia yang tersebar di tiga desa. Mereka menggunakan bahasa Tokelau dan Inggris. Keterpencilan dan kurangnya sumber daya sangat memperlambat pengembangan ekonomi dan memojokkan sektor pertanian yang hanya dapat mencukupi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Minimnya sumber daya alam dan tingginya angka kepadatan penduduk menjadi faktor pendorong imigrasi ke Selandia Baru, akibatnya laju pertumbuhan penduduk menurun 0,9% per tahun.

Di pulau Atafu, seluruh warga merupakan anggota Gereja Kristen Kongregasi Samoa. Di Nukunono, seluruhnya beragama Katolik Roma. Di Fakaofu, terdapat kedua aliran agama tersebut dengan mayoritas aliran Gereja Kristen Kongregasi. Keseluruhan proporsi agama di Tokelau adalah: Gereja Kristen Kongregasi 70%, Katolik Roma 28%, lainnya 2%.

Dilingkungan Tokelau mempunyai sumber daya laut yang melimpah, tetapi memiliki lahan yang sangat terbatas. Terdiri dari tiga atol kecil, Tokelau terdiri dari 127 pulau atau 'motu' panjangnya

bervariasi dari 90m ke 6km, dan lebar dari beberapa meter ke 200m. Kaya sumber daya kelautan negara termasuk laguna, terumbu, dan laut dalam. Perikanan belum secara menyeluruh direkam. Pertumbuhan penduduk berpotensi menimbulkan ancaman, namun tampak bahwa penduduk telah stabil pada sekitar 1.575 orang. Masalah lingkungan lainnya termasuk sering badai dan siklon, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, dan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, pendidikan, perencanaan, manajemen, dan undang-undang, serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dan pembangunan.

3. Sistem politik

Tokelau adalah wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan telah dikelola oleh Selandia Baru sejak 1926. Administrator Tokelau, posisi hukum, dipegang oleh pegawai negeri senior Selandia Baru dan ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Administrator memiliki tanggung jawab teknis untuk administrasi pemerintahan eksekutif Tokelau sebagai diatur dalam Tokelau Act 1948 (sebagaimana telah diubah) dan Administrasi Peraturan Tokelau 1993. Dalam prakteknya, bagaimanapun, melalui transfer progresif wewenang dan tanggung jawab selama dekade terakhir, Tokelau sebagian besar berpemerintahan sendiri dengan sistem pemerintahan berdasarkan kepemimpinan desa tradisional.

Posisi Ulu-o-Tokelau, yakni Kepala pemerintahan nasional, diputar di antara pemimpin masing-masing atol (yang Faipule) secara tahunan. Umum Fono (majelis nasional) bertemu tiga kali dalam setahun dan terdiri dari wakil-wakil terpilih dari masing-masing atol. Otoritas eksekutif terletak pada Dewan Pemerintah sedang berlangsung dari Tokelau yang berbasis di Apia, Samoa. Tokelau tidak memiliki partai-partai oposisi.

Pemerintah Tokelauan Way: Setiap tiga tahun melakukan pemilihan Faipule (Kepala Desa) dan Pulemaku (Walikota terpilih) yang mengarahkan kegiatan desa. Anggota Fono Umum atau Majelis Nasional juga terpilih pada interval tiga tahun untuk menangani isu-isu nasional. Kewenangan Fono Umum diberikan oleh Taupulega yang tetap menjadi sumber utama dari otoritas di Tokelau. Antara pertemuan General Fono, tiga Faipule dan tiga Pulemaku (walikota) bertemu sebagai Dewan Pemerintah sedang berlangsung dari Tokelau yang membentuk dasi antara struktur pemerintahan desa tradisional dan pemerintah nasional.

Amandemen Tokelau disahkan oleh Parlemen Selandia Baru pada tahun 1996, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun itu, diberikan pada Fono Umum sebagai kewenangan untuk membuat aturan untuk perdamaian, ketertiban dan pemerintahan yang baik dari Tokelau, termasuk kekuasaan untuk memaksakan pajak. Aturan dari Fono Umum memiliki kekuatan hukum di Tokelau. Meskipun Aturan dapat dianulir oleh Administrator dalam periode waktu tertentu, dalam praktek kekuasaan ini belum pernah dilakukan. Undang-undang dan hukum Selandia Baru tidak berlaku di Tokelau, kecuali secara tegas diperluas ke Tokelau. Dalam prakteknya, tidak ada undang-undang Selandia Baru diperluas ke Tokelau tanpa persetujuan Tokelauan.

4. Pertahanan dan Imigrasi

Di bawah Prinsip Kemitraan, Selandia Baru tetap bertanggung jawab untuk pertahanan dan keamanan Tokelau. Tokelau mendapatkan manfaat dari program pengawasan maritim dari Angkatan Pertahanan Selandia Baru dan juga didukung sedapat mungkin melalui program-program pertahanan lainnya.

Proses Imigrasi di Tokelau memberikan hak penuh bagi warga negara Selandia Baru, untuk masuk dan tinggal di Selandia Baru dan menerima hak yang sama seperti Selandia Baru lainnya. Tokelauans bepergian menggunakan paspor Selandia Baru.

1.2. PERMASALAHAN DI TOKELAU

1. Pemerintahan Monarki konstitusional di Tokelau

Bentuk pemerintahan yang ada di Tokelau adalah Monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut.

Menurut Thomas Hobbes, monarki absolute atau monarki konstitusional dengan hanya memiliki seorang penguasa adalah bentuk Negara terbaik. Sebab Negara dengan seorang penguasa akan bisa tetap konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Untuk menunjang kekuasaannya, seorang penguasa monarki absolut memiliki hak-hak istimewa, Jika menggunakan pandangan menurut Hobbes yang lebih menekankan bahwa keadaan manusia yang diibaratkan sebagai serigala yang memangsa serigala lain demi mencapai kepentingannya masing-masing, sehingga Hobbes yang beraliran realis ini menyumbangkan pemikirannya tentang Leviathan untuk mendeskripsikan negara. Dalam Leviathan sendiri Hobbes menjabarkan bagaimana penguasa dengan legitimasi mutlaknya dapat mengontrol penuh sebuah negara beserta masyarakatnya. Jika dikaitkan dengan keadaan Tokelau, Selandia baru akan menjadi serigala bagi Tokelau karena pemerintahan Tokelau dipegang oleh selandia baru, walaupun Tokelau memiliki pemerintahan sendiri akan tetapi bersifat tradisional dan berada dibawah pengaruh Selandia Baru, jadi segala keputusan politik di Tokelau harus melalui UU yang ditetapkan oleh Selandia baru.

Tokelau diberikan pada Fono Umum (majelis nasional) sebagai kewenangan untuk membuat aturan untuk perdamaian, ketertiban dan pemerintahan yang baik dari Tokelau, termasuk kekuasaan untuk memaksakan pajak. Aturan dari Fono Umum memiliki kekuatan hukum di Tokelau. Meskipun Aturan dapat dianulir oleh Administrator dalam periode waktu tertentu, tetapi dalam praktek kekuasaan ini belum pernah dilakukan karena kekuasaan politik masih berada dibawah naungan Selandia baru.

2. Permasalahan Ekonomi di Tokelau

Walaupun memiliki sumber daya laut yang melimpah, Tokelau tetap mengalami kekurangan. Pendapatan pemerintah Tokelau yang berjumlah €410.000 per tahun tidak mencukupi pengeluaran sekitar €2,3 juta. Produk ekspor Tokelau senilai €80.000 berupa perangko, kopra, dan kerajinan tangan. Sedangkan produk impor senilai €245.000 berupa makanan, bahan bangunan, dan BBM. Selain itu hasil industri lokal dari usaha-usaha kecil seperti produksi kopra, kayu, kerajinan tangan, perangko, koin dan perikanan belum bisa mencukupi kebutuhannya dan masih terus mendapat subsidi oleh dana bantuan Selandia Baru.

Jika dikaitkan dengan teori depensi klasik, Andre Gunder Frunk, menyatakan bahwa kapitalisme global akan membuat ketergantungan masa lalu dan sekarang oleh karena itu negara yang tidak maju dan berkembang harus memutuskan hubungan dengan negara maju supaya negara berkembang bisa maju, inilah yang terjadi di wilayah Tokelau, segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil Tokelau, baik dari ekonomi, politik, pertahanan harus menggunakan keputusan Selandia baru terlebih dahulu.

Tokelau memang terus mendapat bantuan dari Selandia baru, sehingga inilah yang membuat Tokelau terus bergantung pada Selandia Baru, karena tanpa bantuan Selandia baru, kebutuhan wilayah Tokelau tidak dapat terpenuhi. teori ketergantungan dari Immanuel Wallerstein juga membahas tentang hasil pertukaran yang tidak seimbang dalam status yang tidak merata negara. Negara-negara inti menumpuk kekayaan dengan mengumpulkan sumber daya dari dan menjual barang-barang kembali ke pinggiran dan semi-pinggiran. Itulah yang selalu membuat Negara pinggiran sangat bergantung kepada Negara besar, sama seperti Tokelau dan Selandia baru.

2. KEPULAUAN PITCEIRN

2.1. SEJARAH DAN PROFIL KEPULAUAN PITCEIRN

Kepulauan Pitcairn merupakan kumpulan dari lima pulau, di mana hanya Pulau Pitcairn yang dihuni, yang terletak di selatan Samudra Pasifik, satu-satunya koloni Inggris di Pasifik. Kepulauan ini terkenal terutama karena penghuni aslinya ialah para pembajak kapal HMAV Bounty, serta warga Tahiti yang turut dibawa para pembajak. Sejarah ini terlihat jelas melalui kebanyakan nama marga. Kepulauan ini juga merupakan negara (walaupun belum merdeka) dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di dunia. Para arkeologis berpendapat bahwa warga Polinesia telah bermukim di Pitcairn sejak abad ke-15, pulau itu tidak berpenghuni ketika ditemukan oleh penjelajah Spanyol Pedro Fernandez de Quiros. Kemudian Inggris menemukannya pada tahun 1767, dan menamakannya menurut nama awak kapal yang pertama kali melihatnya.

Pada 1790, para pembajak Bounty bersama rekan-rekan asal Tahiti bermukim di Pitcairn dan membakar kapal Bounty. Beberapa pembajak dan orang Tahiti kemudian saling bunuh. Pulau ini menjadi koloni Inggris tahun 1838. Hingga pertengahan 1850-an penduduk Pitcairn semakin bertambah banyak dan mereka memohon bantuan dari Ratu Victoria. Ratu Victoria menawarkan kepada mereka Pulau Norfolk dan pada 3 Mei 1856, seluruh penduduk yang berjumlah 193 orang berlayar menuju Pulau Norfolk dengan menggunakan kapal Morayshire. Mereka tiba pada 8 Juni setelah perjalanan yang melelahkan selama 5 minggu. Namun, 18 bulan kemudian, 17 orang kembali ke Pitcairn dan 5 tahun kemudian 27 lainnya kembali.

Sejak jumlah populasi tertinggi yang mencapai 233 pada 1937, banyak di antara mereka yang beremigrasi, terutama menuju Selandia Baru, sehingga populasi sekarang ini sekitar 50 jiwa. Sisa peninggalan kapal Bounty masih kelihatan dari bawah laut di Bounty Bay.

1. Demografi

Kepulauan Pitcairn terletak di Samudra Pasifik Selatan antara Peru dan Selandia Baru. Kepulauan yang satu-satunya dihuni secara permanen, ibu kota Adamstown, bahasa resmi yang digunakan adalah Inggris dengan dialek pitkeirn, terdiri atas kelompok etnik britania, polinesia dan campuran. Pemerintahan berpusat di wilayah seberang laut britania. Komisioner tinggi kepulauan pitcairn bernama Victoria Treadell dan walikotanya bernama Mike Warren. Kepulauan pitcairn memiliki total luas 47 km². Mata uang, Dolar Selandia Baru (NZD) zona waktu UTC-078 ranah internet .Pn, kode telepon 870.

Pulau ini diakses oleh kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke Selandia Baru dan Amerika melalui Terusan Panama. Kapal terkadang berkunjung ke Pitcairn untuk memberikan bantuan apabila terjadi kondisi darurat (emergency). Kepulauan Pitcairn menerima pasokan kapal yang dijadwalkan setiap tiga bulan untuk membawa makanan, obat-obatan dan persediaan bahan bakar. Tercatat terdapat kurang lebih 50 penduduk tetap di Pitcairn, termasuk 10 anak-anak di bawah usia 15 tahun. Beberapa personil expat dipekerjakan di pulau ini seperti wakil Gubernur, seorang pendeta, polisi, guru sekolah, seorang petugas medis dan petugas kesejahteraan. Kebanyakan pemukiman berada di Adamstown di sisi utara kepulauan Pitcairn. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris dan Pitkern.

2. Situasi politik

Kepulauan Pitcairn adalah Negara protektorat Inggris, dibawah yurisdiksi komisi tinggi Inggris untuk Western Pacific dari 1898 sampai 1952 ketika mengikuti pemisahan kantor Gubernur dan komisaris tinggi. Untuk urusan administrasi Negara ini, tanggung jawab dipindahkan ke

Gubernur Fiji. Ketika Fiji memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971, tanggung jawab dipindahkan ke Komisaris Tinggi Inggris ke Selandia Baru, yang secara bersama memegang jabatan sebagai Gubernur Kepulauan Pitcairn. Administrasi fungsional ditangani oleh Kepulauan Pitcairn. Kantor terletak di Auckland, Selandia Baru. Hal yang perlu dilakukan Kepulauan Pitcairn yakni meyorisdiksi penduduknya. Meskipun belum berdaulat, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan dekolonisasi, Kepulauan Pitcairn termasuk dalam daftar PBB sebagai wilayah non-berpemerintahan sendiri. Pada tahun 2010, setelah berkonsultasi dengan kebanyakan orang di pulau, Pitcairn memperoleh konstitusi baru yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Manusia.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kepulauan Pitcairn hanya mengandalkan penangkapan ikan dan hasil kebun di samping pasokan makanan yang dikirim dari Selandia Baru. Sebab tanah di Kepulauan Pitcairn kualitasnya baik, sehingga tumbuh berbagai macam buah-buahan dan sayuran. Kepulauan Pitcairn masih menggunakan Barter System (Sistem Pertukaran) dalam sistem perekonomiannya dan hal itu bagian penting dari perekonomian. Selain itu pendapatan masyarakatnya berasal dari hasil penjualan prangko untuk kolektor dan kerajinan kepada pengunjung. Tidak ada pelabuhan resmi atau tempat landasan kapal.

Masyarakat Kepulauan Pitcairn tidak lagi mengandalkan penjualan prangko untuk pendapatan mereka sebab, pendapatan mereka menurun drastis sejak kemajuan teknologi di seluruh dunia dalam komunikasi. Saat ini pariwisata dianggap sangat penting untuk masa depan Pitcairn dan jaminan akses yang aman adalah kunci keberhasilan. Di bawah bantuan Dana Pembangunan Eropa Uni Eropa (EDF), Pitcairn telah diberikan sarana untuk mengembangkan tempat pendaratan alternatif di Water Valley, di sisi barat pulau di Tedside. Setelah bertahun-tahun adanya perencanaan, surat menyurat, video conferencing, penulisan laporan, e-shopping, penilaian lingkungan, telah ada bantuan kerjasama perusahaan pelayaran untuk mengangkut barang, adanya proyek pembangunan jalan tujuan akses ke Water Valley. Dengan selesainya proyek jumlah pendaratan turis diperkirakan akan meningkat. Pengunjung tidak lagi bergantung pada pelabuhan kecil di Bounty Bay untuk jalur masuk yang aman. Tempat pendaratan baru juga diharapkan membawa manfaat jaminan kepada masyarakat untuk meningkatkan peluang bisnis industri pariwisata.

4. Risiko, kerentanan dan bahaya

Kerentanan dan bahaya yang dihadapi Kepulauan Pitcairn hampir sama dengan kebanyakan Kepulauan Pasifik lainnya, yang jumlah warganya kecil dan lokasi yang terpencil. Keterpencilan dari perdagangan dan pasokan mitra menimbulkan biaya transportasi yang tinggi, meningkatkan biaya bisnis. Keterpencilan juga meningkatkan biaya pelayanan sosial dan perlindungan.

2.2. PERMASALAHAN DI KEPULAUAN PITCAIRN

1. Kompleksitas Hubungan Kepulauan Pitcairn dan Inggris

Kepulauan Pitcairn telah mendapatkan pengakuan oleh PEW sebagai lingkungan laut murni hal tersebut telah mengakibatkan Pemerintah Inggris melobi dengan maksud untuk mengusulkan cadangan laut di Perairan Pitcairn: sebuah ZEE sekitar 800.000 km. Kepulauan Pitcairn bergantung sepenuhnya dengan Inggris. Pemerintah Inggris melakukan pengalokasian dana sekitar US \$ 4 juta per tahun untuk menggaji porsenil profesional seperti polisi, dokter, masyarakat dan pekerja sosial dan perwakilan gubernur. Misalnya pada tahun 2011-2012 ulasan anggaran untuk Kepulauan Pitcairn menunjukkan bahwa dari tagihan gaji sebesar US \$ 950.000 (27% dari yang diusulkan pengeluaran anggaran) 21% dialokasikan untuk gaji, pensiun dan tunjangan lainnya, sementara 79% arusnya tidak jelas (Summerfield, 2011).

Usia kerja masyarakat Kepulauan Pitcairn variatif, Pemerintah membayar mereka dengan

upah minimum US \$ 8.00 per jam dan mereka juga harus membayar pajak karena total pendapatan tahunan antara US \$ 3.000 - \$ 4.600 di atas ambang batas yang diperlukan untuk perpajakan. Terjadi Ketidakadilan dari tingkat pendapatan dan jumlah dana yang tersedia di kas pemerintahan. Tenaga ahli profesional dibayar dengan gaji tinggi sedangkan masyarakat pitcairn memperoleh gaji yang tidak setimpal dengan usaha yang mereka lakukan. Pada awal tahun 2007 tapi dalam membahas Konstitusi Pitcairn yang merupakan “kemitraan adalah asosiasi sukarela” kita harus menerima kenyataan bahwa Konstitusi untuk Kepulauan pitcairn disahkan oleh London yang dapat mengubahnya secara sepihak setiap saat dan bahwa, oleh dan didalam konstitusi tersebut istilah konstitusi sendiri, tak satu pun dari “nilai-nilai kemitraan” yang diberlakukan. Pada tahun 2009, penciptaan empat divisi: masyarakat, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam, dan tindakan operasional yang dipimpin oleh Divisi Manajer dan diawasi oleh pemegang Portfolio (anggota Dewan terpilih) dilaksanakan di bawah sistem yang kompleks dan strukturnya terlalu kerarah kebijakan birokrasi. Tepat dijuluki oleh penduduk setempat sebagai “The Christmas Tree”. Pada kenyataannya, jumlah “cabang” telah dibuat untuk sistem agak rumit dan tidak efisien bagi masyarakat kepulauan pitcairn.

Sebuah aturan yang membingungkan bagi pemerintahan untuk rakyat kecil yang jumlahnya kurang lebih lima puluh orang. Pada awal tahun 2007 meminta otoritas Inggris untuk memberikan tata kelola pelatihan bagi mereka di pulau. Dari catatan, pada tahun 1940 Harry Maude menganjurkan pelatihan untuk Pitcairn. Setelah permintaan mereka disediakan dengan beberapa jam seminar tentang “good governance” (Ford, 2010) dan itu tidak sampai 2013 bahwa seminar lebih bertarget termasuk manajemen kinerja dan hubungan kerja dilakukan pada pulau. Meskipun lebih banyak kekuatan dipindahkan dari Selandia Baru ke PIC dan ke empat divisi, tidak ada pelatihan politik atau manajerial diberikan kepada pulau.

Pada tahun 2003, baik pendidikan umum dan penyebaran informasi disorot sebagai hal penting untuk semua wilayah luar negeri dalam rencana aksi sepuluh poin tentang Penentuan Nasib Sendiri disajikan oleh PBB khusus Komite Dekolonisasi. Pemerintahan Inggris berkomitmen untuk menyediakan program pendidikan politik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Resolusi PBB 1541 tahun 1960, dan Resolusi PBB 2625 1970. Restrukturisasi politik Pitcairn telah mengandalkan hubungan yang lebih dekat dan lebih ketat dengan Departemen Pembangunan Internasional (DFID), dan Uni Eropa (EU), dan kebutuhan untuk mengamankan pendanaan eksternal untuk proyek-proyek baru. Tahap pertama dari proses ini melihat membangun kembali dari peluncuran kapal dan dermaga di Bounty Bay dan pembangunan jalan beton up aptly bernama “Difficulty Hill”. Rute ini telah menjadi garis hidup untuk Pitcairners. - Jalan yang panjangnya 90 meter dari lumpur track yang membawa pasokan dan penumpang dari kapal ke pantai. Jalan akhirnya diaspal pada tahun 2006 (pasca uji coba), membuat mengangkut pasokan dan akses banyak mudah bagi penduduk pulau. Setelah ini, sebuah gedung sekolah yang baru dibangun kembali, satelit baru Sistem komunikasi menyediakan fasilitas internet, dan pembangunan museum.

Pembangunan infrastruktur telah meminta ekstensi atau risiko kehilangan total alokasi dana Kepulauan Pitcairn. Inggris telah membuat dokumen hukum kolonial dalam rangka pengangkatan wakil gubernur, dan perjanjian pembangunan infrastruktur. dana makan terutama oleh penjualan peranko, koin dll, untuk biaya operasional pulau, untuk pendidikan dan kesehatan, modal barang-barang seperti perahu-perahu panjang, traktor, dan generator dan gaji mereka yang diatur oleh pemerintahan inggris.

Kompleksitas, ketegangan dan perubahan sosial-politik mempengaruhi masyarakat Kepulauan Pitcairn. Perubahan tersebut adalah hasil dari hegemoni dan paksaan sosial-politik. Kepulauan Pitcairn terkena pasukan globalisasi dan tunduk pada orang-orang dari korban. Dalam hal ini, itu adalah Kepulauan Pitcairn adalah korban sekunder oleh petugas sistem peradilan. Masyarakat pulau terpencil yang hanya berjumlah kurang lebih 53 orang berusaha untuk menciptakan masa depan

yang layak, menarik imigran baru dan berusaha untuk membangun sebuah identitas melampaui cobaan, kompleksitas dari dekolonisasi dan melepaskan diri. Yang dimana terus Muncul pengawasan berkelanjutan dari proses politik.

2. Analisis Hubungan kompleksitas antara kepulauan pitceirn dan Inggris

Kompleksitas antara kepulauan pitceirn dan Inggris dapat dianalisis menggunakan pendekatan realisme dan marxisme dalam studi hubungan internasional. Jika kita menggunakan kacamata kaum realis. Eksistensi Negara dipandang sangat esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa Negara yang menjamin alat-alat dan kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan kehidupan manusia. Seperti pernyataan Thomas Hobbes yang terkenal (1946) “terpencil, miskin, sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan dan singkat.” Dengan demikian Negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Hal inilah yang terjadi di kepulauan pitceirn, dimana Negara terkecil dan terpencil didunia ini belum bisa memenuhi hak fundamental rakyatnya, belum mampu memberikan kedaulatan bagi negaranya sendiri, alhasil masih sangat bergantung pada Negara Great Power dalam melangsungkan kehidupan negaranya.

Kerjasama yang dilakukan oleh Inggris atas kepulauan pitceirn bagi kaum realis ada kepentingan terselubung didalamnya. Kaum realis meyakini bahwa Negara selalu mengejar kepentingan nasionalnya sendiri, semua kesepakatan perjanjian internasional hanya bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan Negara-negara untuk mematuinya. Pembuatan Konstitusi untuk Kepulauan pitcairn yang disahkan oleh London yang dapat mengubahnya secara sepihak setiap saat dan didalam konstitusi tersebut tak satu pun dari “nilai-nilai kemitraan” yang diberlakukan. Hal itulah yang menggambarkan bahwa power yang dimiliki oleh Inggris dapat mengintervensi kepulauan pitceirn untuk menyetujui segala bentuk kebijakan yang diambil demi kepentingan nasional inggris.

Seperti yang dijelaskan oleh Thucydides, Machiavelli, Hobbes dan tentunya semua kaum realis klasik memiliki pandangan yang sama. Mereka yakin bahwa tujuan kekuasaan, alat-alat kekuasaan dan penggunaan kekuasaan merupakan perhatian utama aktifitas politik. dengan demikian politik internasional digambarkan sebagai “politik kekuasaan (power politics)”: suatu arena persaingan, konflik dan perang antara negara-negara di mana masalah-masalah dasar yang sama dalam mempertahankan kepentingan nasional dan dalam menjamin kelangsungan hidup negara.

Dalam studi kasus Kepulauan pitceirn dan Inggris, Penulis juga menggunakan pendekatan Strukturalis. Suatu pendekatan yang melihat kelas-kelas sosial yang teraplikasi dalam sistem internasional. Dalam pendekatan strukturalisme ada yang dinamakan world-system theory World-system theory yang membagi negara-negara dibagi atas tiga pelapisan, yaitu: (1) Core state, Peripheral state dan Semi-peripheral state. Inggris merupakan Core State sebagai Negara pemilik modal yang dapat memberikan bantuan dana, memiliki otoritas penuh atas Kepulauan pitceirn. Sedangkan Kepulauan Pitceirn sendiri merupakan negara semi-peripheral yang hanya mampu mengirimkan sumber daya alam yang ada di kepulauan pitceirn dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan mereka sendiri yang menjadi pekerja di Negaranya sendiri dan dibayar oleh Inggris dengan upah yang rendah dan Inggris yang mendapatkan keuntungan yang melimpah atas kerja keras masyarakat Kepulauan Pitceirn.

Hubungan Kepulauan Pitceirn dan Inggris tidak dapat dipungkiri bahwa adanya Ketergantungan . Dalam pendekatan strukturalisme juga dikenal dependency theory. Teori ini berhubungan dengan teori sebelumnya, menyatakan bahwa negara maju memang membutuhkan negara berkembang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Basis dari politik internasional memang seperti itu adanya. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri negara-negara kaya adalah untuk memelihara ketidak setaraan

atau inequality karena sesungguhnya dalam menjalankan sistem internasional, ketidaksetaraan adalah hal yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap Negara. Melihat keadaan dunia yang sekarang ini, memang tidak mudah jika negara-negara di dunia ini tidak saling bergantung satu sama lain. Pasti ada eksploitasi sumber daya oleh negara kaya kepada negara miskin, namun mungkin kaum marxis melihat eksploitasi secara berlebihan. Padahal jika dilihat kenyataannya, eksploitasi bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan. Ada hubungan timbal balik dalam praktik eksploitasi tersebut sehingga kebutuhan setiap negara bisa terpenuhi. Karena pada dasarnya memang negara sudah terstruktur sedemikian rupa.

3. AMERICAN SAMOA

3.1. PROFIL DAN SEJARAH AMERICAN SAMOA

American Samoa adalah wilayah yang tak terorganisasi dan terpisah milik Amerika Serikat yang terdiri dari wilayah timur, yang terletak di bagian selatan-tengah pasifik. Wilayah ini berada sekitar 1.600 mil (2.000 km) timur laut dari Selandia Baru dan 2.200 mil (3.500 km) dari AS negara bagian Hawaii. American Samoa terdiri dari Pulau Tutuila, Tau, Olosega, Ofu, dan Aunuu. Ibukota American Samoa adalah Pago Pago, Tutuila.

Kepala negara Amerika Serikat, Barack Obama. Kepala pemerintahan gubernur, Lolo Matalasi Moliga. Pemerintah adalah majikan utama. Sebagian pendapatan nasional dalam bentuk hibah dari Pemerintah federal Amerika Serikat. Pengalangan tuna dan pariwisata yang merupakan industri besar. American Samoa merupakan wilayah agrasi di wilayah pasifik. Kelimpahan sumber daya laut sangat tinggi dan pertanian seperti talas, pisang, buah-buahan tropis, sayuran dan sebagainya. Amerika Serikat telah melaksanakan program untuk meningkatkan produksi kemandiriannya. Amerika Serikat adalah sumber utama impor di American Samoa.

Pada tanggal 26 Oktober 2015 Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengusulkan rancangan undang-undang untuk meningkatkan transportasi dalam American Samoa. Asisten Sekretaris Esther Kia'aina mengatakan transportasi tidak dapat diandalkan di pulau-pulau dan membuat pariwisata, pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi terhambat.

3.2. PERMASALAHAN DI AMERICAN SAMOA

1. Permasalahan Sistem Transportasi di American Samoa

American Samoa adalah sebuah negara kepulauan di selatan Pasifik dan terdiri dari lima pulau vulkanik dan dua coral atolls. American Samoa merupakan wilayah yang dikelilingi oleh laut. Tak heran jika warga American Samoa masih mengeluh dengan transportasi dari pulau ke pulau. Untuk transportasi lokal American Samoa memiliki bus, taxi, dan terdapat juga mobil sewa. Untuk transportasi luar mereka memiliki bandara dan pelabuhan. Terdapat tiga bandara, bandara Internasionalnya terletak di Pago Pago. Sedangkan pelabuhan yang juga terletak di Pago Pago.

Untuk wilayah yang mayoritas kegiatan ekonominya adalah laut, transportasi American Samoa tidak dapat diandalkan. Saat ini tidak ada operator udara AS yang menyediakan layanan di rute. Sebuah operator asing telah memberikan layanan darurat di bawah kemampuan undang-undang. Seorang konsultan Dennis Lennox mengatakan bahwa American Samoa telah mencoba untuk mendapatkan sabotase hukum dibebaskan selama bertahun-tahun yang akan memungkinkan operator asing untuk mengoperasikan dan keluar dari American Samoa kepada bandara Amerika yang lain untuk meningkatkan pembangunan pariwisata.

Dinas perhubungan Amerika Serikat telah memberi 30 hari sabotase pernyataan untuk pemerintah Samoa mengoperasikan Polynesian Airlines di wilayah setempat. Polynesia meminta enam bulan pengecualian untuk aturan federal pembatasan transportasi diluar operator. Tetapi

pemerintah Amerika Serikat menolak. Dalam pemberitaan terbaru Polinesia meminta agar diizinkan untuk terus membawa orang-orang, properti, barang-barang dan surat antara Pulau Tutuila dan Pulau Manua selama enam bulan.

Laut sebagai jalur komunikasi diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang. American Samoa adalah salah satu penghasil terbesar ikan kaleng di dunia dan juga sebagai sumber alam hayati. Dalam sebuah pernyataan, pemilik Starkist Samoa pabrik pengalengan terbesar di wilayah tersebut mengatakan bahwa ekonomi American Samoa sedang dalam keadaan rapuh atas ketidakpastian atas masa depan ekonomi, kebijakan perpajakan, biaya tenaga kerja, dan sebagainya.

Tuntutan terhadap jasa transportasi laut yang cepat, tepat, aman, nyaman, teratur dan terjangkau oleh para pengguna jasa. Peranan jasa transportasi laut yang efisien dan efektif sangat dominan dalam memperlancar arus barang maupun penumpang dan oleh karena itu perlu diperhatikan keseimbangan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi laut.

Gubernur American Samoa telah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Pertemuan itu membahas tentang kerjasama Indonesia-American Samoa yang merupakan sesama wilayah agraris. Dalam kesepakatan tersebut Dubes Indonesia menggarisbawahi komitmen Pemerintah HI untuk memberikan bantuan pengembangan kapasitas kepada American Samoa. Salah satunya mengikutsertakan pejabat kepolisian American Samoa dalam pelatihan di Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang tahun ini. Bantuan teknis dalam bidang pertanian dan pariwisata juga akan diberikan kepada American Samoa untuk mendorong potensi pertanian dan pariwisata di American Samoa.

2. Analisis Permasalahan Transportasi di American Samoa

Paradigma HI, liberalisme memandang kerjasama antarnegara yang kooperatif dan positif melahirkan suatu perdamaian nasional. Negara dipandang sifatnya positif, oleh karena itu mereka menciptakan suatu harmoni antara negara-negara lain, untuk menciptakan perdamaian dunia.

4. KALEDONIA BARU

4.1. PROFIL DAN SEJARAH KALEDONIA BARU

Kaledonia Baru, atau dalam penggunaan resmi digunakan nama New Caledonia, (dalam bahasa Perancis: Nouvelle-Calédonie), adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan sui generis Perancis. Wilayah ini terletak di sub-benua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Juga dinamai Kanaki yang dari nama penduduk asli kepulauan itu. Negara kepulauan ini telah dikuasai Perancis selain Polinesia Perancis. Status ini dikenakan sampai 1998. Namanya berasal dari bahasa Latin Skotlandia. Ibu kotanya ialah Noumea.

Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18,575 kilometer persegi di Samudera Pasifik yang ditemukan oleh penjelajah **James Cook** pada 4 September 1774 ketika melakukan perjalanan keduanya di kawasan Pasifik. Ia menamakan wilayah ini Kaledonia Baru karena teringat tanah kelahirannya, Skotlandia.

Di bawah pemerintahan Napoleon III, Prancis mengambil alih Kaledonia Baru secara resmi pada 24 September 1853 dan membangun Port de France (Noumea) yang sekarang menjadi ibu kota pada 25 Juni 1854. Tempat itu pada 1864-1897 dijadikan sebagai lokasi pembuangan tidak kurang dari 22.000 narapidana namun setelah Gubernur Prancis di NC, Paul Feillet memberi penghapusan hukuman dan kembali ke kampung halaman mereka, maka imigran dari Asia datang bekerja di pertambangan dan perkebunan di Kaledonia Baru.

Bermula dari aturan Koeli Ordonantie pada 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatra, Prancis

kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru, maka dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa dan tiba di NC pada 16 Februari 1896.

1. Sejarah Kaledonia Baru

Jejak awal keberadaan manusia di tanggal Kaledonia Baru kembali ke periode Lapita. Lapita sangat terampil berlayar dan bercocok-tanam. Penjelajah Inggris, Kapten James Cook adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Kaledonia Baru, pada 4 September 1774, pada saat penjelajahan keduanya. Dia menamakannya “Kaledonia Baru”, sebagai peringatan akan sebuah pulau di timur laut Skotlandia. Pantai barat Grande Terre disisir oleh **Jean-François de Galaup** pada tahun 1788, tak lama sebelum ia menghilang, dan Kepulauan Loyalty pertama kali dikunjungi pada tahun 1796. Sejak saat itu hingga 1840, hanya beberapa kontak sporadis dengan kepulauan tersebut yang tercatat. Kontak menjadi lebih sering setelah 1840, karena minat kayu cendana dari Kaledonia Baru.

Karena perdagangan cendana menurun, perdagangan beralih ke perdagangan blackbird, eufemisme untuk memperbudak orang dari Kaledonia Baru, Kepulauan Loyalty, New Hebrides, New Guinea, dan Kepulauan Solomon untuk bekerja di perkebunan tebu di Fiji dan Queensland. Perdagangan berhenti pada awal abad ke-20. Para korban perdagangan ini disebut “Kanakas”, seperti semua orang Oseania.

Misionaris pertama dari London Missionary Society dan Marist Brothers tiba di tahun 1840-an. Pada tahun 1849, awak kapal Amerika Cutter dibunuh dan dimakan oleh klan Pouma. Saat itu, Kanibalisme tersebar luas di seluruh Kaledonia Baru.

2. Masa Pendudukan Perancis di Kaledonia Baru

Pada tanggal 24 September 1853, di bawah perintah dari Napoleon III, Laksamana Febvrier Despointes menguasai formal Kaledonia Baru, dan Port-de-France (Nouméa) didirikan pada tanggal 25 Juni 1854. Beberapa lusin pemukim bebas menetap di pantai barat di tahun-tahun berikutnya. Kaledonia Baru menjadi penjara seberang laut kolonial Perancis dan dari tahun 1860-an sampai akhir tahun 1897, sekitar 22.000 penjahat dan tahanan politik dikirim ke Kaledonia Baru, di antara mereka, banyak Communiard ditangkap setelah gagal melaju di Komune Paris, termasuk Henri de Rochefort dan Louise Michel. Antara tahun 1873 dan 1876, 4.200 tahanan politik “terdegradasi” di Kaledonia Baru. Hanya 40 dari mereka menetap di koloni; sisanya kembali ke Prancis setelah diberikan amnesti pada tahun 1879 dan 1880.

Pada tahun 1864, nikel ditemukan di tepi Sungai Diahot dan dengan pembentukan Société Le Nikel pada tahun 1876, pertambangan dimulai dengan sungguh-sungguh. Buruh - buruh dikirim Perancis untuk bekerja di tambang, pertama dari pulau-pulau tetangga, kemudian dari Jepang, Hindia Belanda, dan Indocina Perancis.

Penduduk pribumi dikeluarkan dari ekonomi Perancis, ini memicu reaksi keras pada 1878 sebagai Ketua tertinggi Atal dari La Foa berhasil menyatukan banyak suku pusat dan melancarkan perang gerilya yang dibiayai oleh 200 orang Perancis dan 1.000 orang Kanaks. Orang-orang Eropa membawa penyakit baru seperti cacar dan campak. Banyak orang meninggal akibat penyakit ini. Populasi Suku Kanak penduduk menurun dari sekitar 60.000 pada tahun 1878 menjadi 27.100 pada tahun 1921, dan jumlah mereka tidak meningkat lagi sampai tahun 1930-an.

Pada bulan Juni 1940, setelah Kejatuhan Perancis, Dewan Umum Perancis dari Kaledonia Baru sepakat untuk mendukung kebebasan pemerintah Perancis, dan pada bulan September Gubernur pro-Vichy terpaksa meninggalkan Indochina. Pada bulan Maret tahun 1942, dengan bantuan dari Australia, wilayah dijadikan basis penting Sekutu, dan Nouméa menjadi markas besar Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Darat Amerika Serikat di Pasifik Selatan. Armada yang telah berhasil mengalahkan angkatan laut Jepang pada Pertempuran Laut Karang, Mei 1942 berbasis di Nouméa.

Pada tahun 1946, Kaledonia Baru menjadi wilayah luar negeri Perancis. Pada tahun 1953, status kewarganegaraan Perancis telah diberikan kepada semua warga Kaledonia Baru, tanpa memandang etnis dan status.

Populasi Orang Polinesia dan Eropa secara bertahap meningkat, dikarenakan boomingnya nikel dari tahun 1969 sampai 1972, dan Melanesia menjadi minoritas, meskipun mereka masih kelompok etnis terbesar. Antara tahun 1976 dan 1988, Kaledonia Baru mengesahkan lima undang-undang. Setiap undang-undang menjadi sumber ketidakpuasan dan gangguan yang serius, berpuncak pada tahun 1988 dengan kejadian berdarah yaitu penyanderaan di Ouvea. Perjanjian Matignon, yang ditandatangani pada 26 Juni 1988, memastikan satu dekade kestabilan. Perjanjian Noumea tertanggal 5 Mei 1998, menetapkan dasar bagi transisi 20 tahun yang secara bertahap akan meningkatkan kompetensi kepada pemerintah daerah.

3. Kondisi Perpolitikan di Kaledonia Baru

Kaledonia Baru adalah jajahan sui generis kolektivitas. Ini diatur oleh 54-anggota Kongres Kaledonia Baru, badan legislatif yang terdiri dari anggota tiga majelis provinsi. Negara Perancis diwakili di wilayah itu oleh seorang Komisaris Tinggi. Pada tingkat nasional, Kaledonia Baru diwakili dalam Parlemen Perancis oleh dua deputi dan dua senator. Pada Pemilihan Presiden Perancis 2012, jumlah pemilih di Kaledonia Baru mencapai 61,19%.

Selama 25 tahun, sistem partai di Kaledonia Baru didominasi oleh partai anti-kemerdekaan The Rally-UMP. Dominasi ini berakhir dengan munculnya partai baru, Avenir Ensemble, yang juga menentang kemerdekaan, tetapi dianggap lebih terbuka untuk berdialog dengan gerakan suku Kanak, yang merupakan bagian dari Kanak and Socialist National Liberation Front, koalisi beberapa kelompok pro-kemerdekaan.

4. Otoritas Adat di Kaledonia Baru

Masyarakat Kanak memiliki beberapa lapisan otoritas adat, dari 4.000-5.000 klan berbasis keluarga dengan delapan wilayah adat (*aires coutumières*) yang membentuk wilayah. Setiap klan dipimpin oleh kepala marga dan terdiri dari 341 suku, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku. Suku-suku yang lebih dikelompokkan menjadi 57 kumpulan adat (*chefferies*), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala kepala, dan membentuk subdivisi administratif daerah adat.

5. Kondisi Militer di Kaledonia Baru

Angkatan Bersenjata Kaledonia Baru (*Forces armées de Nouvelle-Calédonie*) terdiri atas sekitar 2.000 tentara, terutama ditempatkan di Koumac, Nandi, Tontouta Plum, dan Noumea. Pasukan darat terdiri dari resimen dari Pasukan angkatan laut, Resimen Infanteri kelautan Pasifik. Angkatan laut termasuk dua kapal patroli kelas P400, seorang BATRAL, dan kapal patroli dari Maritime Gendarmerie. Angkatan udara terdiri tiga pesawat angkut Casa, empat helikopter Puma dan helikopter Fennec yang berbasis di Tontouta. Selain itu, 760 gendarme dikerahkan di daerah kepulauan.

4.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KALEDONIA BARU

Satu-satunya negara yang masih berusaha mempertahankan kehadirannya sebagai kekuatan kolonial secara menyolok di Pasifik Selatan (Pasifik Barat Daya) adalah Perancis, sehingga ia bisa disebut sebagai negara kolonial pertama dan terakhir di kawasan ini. Negara-negara jajahan atau bekas jajahan Perancis terdiri atas: Kaledonia Baru, Polnesia Perancis, Wallis, Futuna dan Vanuatu (sebelumnya New Hebrides). Sampai saat ini Perancis berusaha untuk tetap bertahan di kawasan ini disebabkan adanya beberapa alasan yaitu:

Pulau-pulau atoll Polin Kaledonia Baru, Polnesia Perancis, Wallis, Futuna dan Vanuatu.

Sampai saat ini Perancis berusaha untuk tetap bertahan di kawasan ini disebabkan adanya beberapa alasan yaitu:

- a. Pulau-pulau atoll Polinesia Murora dan Fangataufa menjadi tempat-tempat percobaan senjata-senjata nuklir Perancis.
- b. Kaledonia Baru merupakan sumber mineral yang paling berharga di Pasifik Selatan, dengan cadangan nikel yang besar di dunia, cadangan-cadangan mineral lain dan sedang melakukan eksplorasi minyak lepas pantai.
- c. Jajahan Perancis di Pasifik Selatan adalah sekitar 22.600 km², tetapi zona ekonomi 200 mil memperluasnya lebih dari 7 juta km persegi sehingga Perancis menjadi kekuatan maritim paling besar di Pasifik Selatan.
- d. Teori domino masih berlaku di Perancis, artinya Paris takut jika ia memberikan kemerdekaan kepada kaledonia Baru, maka Polinesia akan segera menyusulnya (Ronald Nangoi, 1982:732)

4.3. ANALISIS PERMASALAHAN DI KOLODINIA BARU

Jika dianalisis dengan paradigma Hubungan Internasional, maka permasalahan ini dapat dikaitkan dengan paradigma realisme. Dalam paradigma ini, para realist menganggap bahwa umat manusia pada dasarnya tidak murah hati melainkan bersifat egois dan kompetitif. Selain itu, salah satu ide utama dalam realisme adalah masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup, oleh karena itu negara berusaha membangun kekuatan dengan kekuatan militer untuk bertahan hidup yang akhirnya menciptakan dilema keamanan bagi negara lain. Dari sinilah ada anggapan bahwa Perancis berpikir secara realistis dalam mempertahankan kekuatan negaranya dengan membangun kekuatan militer melalui wilayah Kaledonia Baru dan negara-negara pasifik selatan lainnya.

3. KESIMPULAN

Tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa hampir semua Negara teritori Asing di kawasan pasifik barat daya merupakan wilayah yang tanpa pemerintahan dan telah dikelola oleh Negara bekas koloni. Misalnya saja Selandia Baru pada 1926, posisi hukum yang dipegang oleh Selandia Baru, membuat Tokelau tidak dapat mengatur segala keputusan yang diinginkan, setiap kebijakan harus diketahui oleh Selandia baru. Kepulauan Pitcairn Sebagai Negara protektorat Inggris, dibawah yurisdiksi komisi tinggi Inggris untuk Western Pacific dari 1898 sampai 1952 dimana Negara ini untuk urusan tanggung jawab dipindahkan ke Gubernur Fiji. Ketika Fiji memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971.

Terdapat keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh Negara-negara yang sistem pemerintahannya diatur oleh Negara koloni misalnya segala bentuk dan jenis kebijakan atur dan ditetapkan oleh Negara koloni tanpa harus mempertimbangkan atau mendengar aspirasi Negara-negara teritori. Kadangkala kebijakannya merugikan bahkan cenderung mengeksploitasi masyarakat dinegara-negara teritori asing pasifik barat daya. Kemiskinan Negara-negara teritori kerap kali mengharuskan patuh terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Negara koloni sebab Negara-negara ini belum mampu memenuhi kebutuhan fundamental rakyatnya dan membuat negaranya berdaulat. Negara-negara teritori asing ini masih sangat membutuhkan bantuan Negara-negara koloni baik kebutuhan kemanusiaan maupun militer.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Negara-negara teritori adalah akses terhadap dunia luar yang sulit sebab wilayahnya terpencil dan akses informasi yang minim akibatnya kegiatan ekonomi lumayan sulit untuk terlaksana dengan baik. Selain masalah perekonomian, Jumlah penduduk yang berpendidikan rendah yang belum mampu membawa Negara-negara kearah yang lebih baik. Ketersediaan lahan yang terbatas, tidak adanya rute atau bandara yang tersedia,

sehingga kegiatan wisata kenagara-negara teritori terhambat padahal sector pariwisata adalah sumber pendapatan terbesar Negara-negara teritori. Perubahan iklim juga memicu kendala, perubahan iklim dapat berupa bencana di wilayah tersebut, seringkali wilayah tersebut terkena badai maupun kenaikan permukaan air laut. Dan yang paling tragis adalah empat percobaan persenjataan nuklir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, Robert dan John Connell. 2006. *France's Overseas Frontier: Départements et territoires d'outre-mer*. Inggris: Cambridge University Press
- Angleviel, Frédéric. 2002. *De Kanaka À Kanak: L'perampasan D'un Terme Générique Au Laba De La Revendication Identitaire*. New Caledonia: Université de la Nouvelle Calédonie.
- Buecker, Regina. 2003. "Karl Marx's Conception of International Relations", dalam *Glendon Journal of International Studies*. hal 49-58.
- Irenewaty, Terry. *Peranan Amerika Serikat Pasca Dekolonisasi di Negara-Negara Kawasan Pasific Selatan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Dobell, Graeme. (2007). *the South Pacific : Diplomatic*
- Jackson, Robert & Sorensen, George. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press Inc., New York
- Knauff, Bruce M. 1999. *From Primitive to Postcolonial in Melanesia and Anthropology*. Amerika Serikat: University of Michigan Press
- Morgenthau, Hans J. 1960. *Politics among Nations; The Struggle for Power and Peace*, 3rd edn. New York: Knopf.
- Potter, E.B. Chester W. Nimitz (1960). *Sea Power*. Prentice-Hall.
- Sanders, SM ed. (2006) *Bird Areas Penting di Inggris Overseas Territories*. Sandy, UK: RSPB.
- Wightman, B. (2010). *Lost in space: geography, architecture and culture in Eilis ni Dhuibhne's The Bray House*. *Space and Culture*, 13(2), 164-177.
- Winchester, S. (2003). *Outposts: Journeys to the surviving relics of the British empire*. New York: HarperCollins.
- WPHC (1940). *Pitcairn Island: Visit of H.E. Maude, Esquire, to 1940-41*. New Zealand: University of Auckland Library Special Collections: File no. 2698/1940. Western Pacific High Commission.
- Young, R. A. (1894). *Mutiny of the Bounty and story of Pitcairn Island: 1790-1894*. Oakland, CA: Pacific Press Publishing
- PDF: 2011 Annual Report of Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme

Referensi

- ABC. 1998. *Charting The Pacific – Places*. Australia: ABC. http://www.abc.net.au/ra/pacific/places/country/new_caledonia.htm. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Anaya, James. *The Situation of Kanak People In New Caledonia, France*. http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2011-newcaledonia-a-hrc-18-35-add6_en.pdf. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/14373/HERMES_2002_32-33_191.pdf?sequence=1 (Diakses tanggal 27 Oktober 2015.)
- <http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/site/Simplifiez-vous-l-Etat/Elections/Les-differentes-elections/Les-differentes-elections> (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Hukum Online. 2015. Keppres No. 45 Tahun 1993. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl39648/parent/22341> (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- IEOM Nouvelle-Caledonie. 2010. *Rapport Annuel 2010*. New Caledonia: IEOM Nouvelle-Caledonie.

- http://www.ieom.fr/IMG/pdf/ra2010_nouvelle-caledonie.pdf. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- ISEE. 2014. Habitants En 2014. <http://www.isee.nc/population/recensement/structure-de-la-population-et-evolutions>. Perancis: ISEE. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- LeMonde. 2010. La Nouvelle-Calédonie Se Dote D'un Hymne Et D'une Devise. Perancis: LeMonde http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/18/la-nouvelle-caledonie-se-dote-d-un-hymne-et-d-une-devise_1399996_823448.html. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Logan, Leanne dan Geert Cole. 2001. New Caledonia. Australia: Lonely Planet
- Minister Of The Interior, Government Of France. Resultats De L'élection Presidentielle. Perancis: Government Of France http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2012/000/988/index.html. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Nouvelle Caledonie Government. 2011. Les Differentes Elections. New Caledonia: Nouvelle Caledonie Government. <http://web.archive.org/web/20111111063921/> (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Nouvelle Caledonie Government. Senat Coutumier. New Caledonia: Nouvelle Caledonie Government. <http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/site/La-Nouvelle-Caledonie/Les-Elus/Senat-coutumier> (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Novouille Caledonie. 2012. Histoire / La Nouvelle Caledonie Government. New Caledonia: Novouille Caledonie. <http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/site/La-Nouvelle-Caledonie/Histoire/Histoire> (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Rottman, Gordon L. 2002. World War 2 Pacific Island Guide. Amerika Serikat: Greenwood Publishing Group Encyclopedia Britannica. 2006. New Caledonia. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/411221> (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- Stanley, David. 1989. South Pacific Handbook. Amerika Serikat: Avalon Travel
- Teguh. 2011. 115 Tahun Mereka di New Caledonia. <http://selokartojaya.blogspot.com/2011/03/115-tahun-mereka-di-new-caledonia.html>. (Diakses tanggal 27 Oktober 2015)
- The Telegraph. (2012). Britain wasted £250,000 on failed wind farm project in the South Pacific. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/pitcairnlands/9978125/Britain-wasted-250000-on-failed-wind-farm-project-in-South-Pacific.html> (Diakses pada tanggal 28 oktober 2015)
- Tokelau website <http://www.tokelau.org.nz/Tokelau+Government.html> (Diakses tanggal 29 Oktober 2015 pukul 16.54)
- Trenwith, A. (2003). The empire strikes back: human rights and the Pitcairn proceedings. *Journal of South Pacific Law*, 7(2), Part V. <http://www.paclii.org/nournals/fJSPL/vol09no2/3.shtml> (Diakses pada tanggal 28 oktober 2015)
- United Nations. (2010). Chapter xi: Declaration regarding non-self-governing territories. <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter11.shtml> (Diakses pada tanggal 29 oktober 2015)
- WorldFactbook <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tl.html> (Diakses pada 29 Oktober 2015 pukul 16.13)
- www.nationsonline.org/oneworld/american_samoa.htm#News (diakses 28 Oktober 2015)
- www.Radionz.co.nz (diakses 28 Oktober 2015)